

DAFTAR PUSTAKA**Referensi/Buku:**

- DR.M.Solly Lubis,SH, *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintah Daerah*,Alumni, Bandung,1983.
- Djojohadikusumo, Sumitro., *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta, 1994.
- Deddy Supriady Bratakusumah, 2011, *Pengembangan Otonomi Daerah*, Bappenas, Jakarta
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Kotler, Philip; Somkid Jatusripitak; Suvit Maesincee, *Pemasaran Keunggulan Bangsa*, Jakarta, 1998.
- Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta, 1997.
- Tambunan, Tulus T.H., *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

Normann, 1991, *Mengenai Karakteristik Pelayanan*, Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro; Mustopadidjaja, *Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan nasional*, Jakarta, 1984.

Todaro, Michael. P., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam, Jakarta, 1998.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005, *Definisi Pelayanan*, Jakarta.

Raymond A. Bauner, *The Study of Policy Farmation*, 1968.

Peraturan:

Undang-Undang Dasar 1945, Sebagai Peraturan Dasar

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

Unadang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional

UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 22/1999 Pasal 1

Keputusan Presiden No.27 tahun 1980, tentang pembentukan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA

Surat Keputusan Gubernur Nomor 163 tahun 1969,
tanggal 6 Agustus 1969

Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara no. 63/KEP/M.PAN/7/2003.